

KATA PENGANTAR

Setiap instansi memiliki target pencapaian kinerja setiap tahunnya yang harus diemban sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilakukan. Penetapan program dan kegiatan dimaksud sedianya dilakukan pada tahapan perencanaan.

Menteri Dalam Negeri melalau Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang salah satunya adalah penyusunan Renja OPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku tahun 2023 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan RKPD serta diharapkan dapat dipedomani dan ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Dareah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.

Ambon, Maret 2022

**Kepala Pelaksana
BPBD Provinsi Maluku,**

HENRI M. FAR FAR, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620707 199211 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI RENJA 2021, PERKIRAAN CAPAIAN RENJA 2022 DAN CAPAIN SERTA TARGET RENSTRA SKPD 2019-2024.....	3
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021	3
2.2. Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022.....	13
2.3. Capaian dan Target Renstra 2019-2024.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	20
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 Tahun yang berisikan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Renja OPD yang merupakan tahapan awal perencanaan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RPKD.

Dalam proses penyusunan Renja OPD ini mengacu pada perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RPKD yang merupakan jabaran penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiran maju berdasarkan program prioritas RENSTRA OPD. RENJA OPD ini juga dapat dijadikan dasar dalam proses penyusunan Renja Kementrian dan Lembaga serta Rencana Kerja OPD, yang merupakan suatu tahapan penyusunan Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah 1 tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2008 tentang, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah
12. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai perwujudan mekanisme koordinasi dan konsolidasi dan perencanaan, pembangunan penanggulangan Bencana pada tahun 2023. Adapun tujuan penyusunan Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Maluku.
2. Merumuskan Program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKPD yang merupakan jabaran penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas untuk periode 1 Tahun kedepan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku tahun 2023 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR pernyataan dan komitmen Kepala Badan tentang Rencana Kerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku tahun 2023.

BAB I. PENDAHULUAN, yang merupakan penjelasan umum, Latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika Renja tahun 2023.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2021, yang merupakan deskripsi umum pencapaian hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dan capain Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan awal OPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, yang berisi Telaahan tentang kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan Tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP, menguraikan secara singkat tentang penegasan kembali penyusunan Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku 2023, serta harapan-harapan keberhasilan pelaksanaannya.

BAB II. EVALUASI RENJA 2021, PERKIRAAN CAPAIAN RENJA 2022 SERTA CAPAIAN DAN TARGET RENSTRA OPD OPD TAHUN 2019-2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021.

Untuk tahun anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku mendapat alokasi Anggaran belanja langsung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Renja Tahun 2021 sebesar Rp. 12.192.546.168,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp. 10.462.264.811,11 (85,81%) dengan sisa anggaran 1.730.465.357,- (14,19%). Anggaran ini direalisasikan untuk membiayai program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, pelayanan dan disiplin serta kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk menunjang pencapaian indikator dari program diatas, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 202.960.010,- (...%) dan fisik 100%. Sehingga Sisa Anggaran sebesar Rp. 47.039.990,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 dokumen rencana kerja (RENJA) BPBD Provinsi Maluku tahun 2022

Hasil (Outcome) :

Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan unit penyelenggara bencana di Provinsi Maluku.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3892276168,- dengan realisasi keuangan Rp. 3302283350,- (..%) dan fisik 100%. Sehingga Sisa Anggaran sebesar Rp. 589.992.818,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya gaji dan tunjangan lainnya bagi 32 ASN selama 12 bulan di tahun 2021

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kesejahteraan dan disiplin aparatur pada BPBD Provinsi Maluku.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.155.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp.146.876.844,- (94.52%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.8.524.156. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 3 saluran telepon, 1 saluran internet dan 1 jaringan listrik.

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya Kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas perkantoran.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.63.488.080,- (97.67%) dan fisik 100%. sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 1.511.920,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

- Tersedianya jasa 2 orang tenaga cleaning service
- Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor berupa : 25 botol cairan pembersih lantai, 25 botol cairan pembersih WC, 25 botol cairan pembersih kaca, 24 pak kanfer WC, 5 buah sapu ijuk plastik, 5 buah alat pembersih lantai, 6 buah tong sampah besar, 6 buah serokan, 10 buah kemoceng, 6 buah sikat kloset, 6 buah sikat lantai WC, 6 buah keset kaki karet, 8 buah keset kaki karet warna, 20 pak tisu roll, 20 lusin tisu dos, 20 lusin tisu paseo, sabun cair 24 lusin, 3 buah ember plastik, 6 buah gayung, 6 buah keranjang sampah, 8 buah kain lap halus dan 8 buah kain lap kasar.

Hasil (Outcome) :

Terpeliharanya Kebersihan kantor/Tempat kerja.

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.72.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.62.164.000,- (86.34%) dan fisik 100%. sehingga sisa anggaran sebesar Rp.9.836.000,-Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Alat Tulis Kantor berupa : Kertas HVS F4 70gr 400 rim, kertas HVS A4 70g 400 rim, kertas HVS folio warna 12 buah, Kertas faximille 6 roll, Map dokumen keper 24 buah, map snelhter 50 buah, map plastik 50 buah, map batik 50 buah, kwitansi 3 ttd 24 buah, amplop putih panjang 30 dos, amplop cokelat (G.310) 21 lembar, amplop cokelat sedang 30 lembar, amplop cokelat besar 20 lembar, tinta bantal cap 2 buah, tinta printer hitam 50 botol, tinta Hp Laserjet hitam 12 buah, Klip binder no. 260 24 dos, klip binder no. 200 24 dos, klip binder 155 25 dos, klip binder 111 25 dos klip kertas berwarna 24 dos, klip kertas kecil 24 dos, Hekter max no.12/17 1 buah, isi hekter kecil 12 dos, isi hekter besar 12 dos, spidol snowman 10 buah, stabilo boss 8 buah, penghapus whiteboard 12

buah, lem tackol besar 6 buah, lakban jilid 12 roll, gunting besar 8 buah, pisau cutter besar 8 buah, isi pisau cutter besar 8 kotak, compact Disk/RW 2 buah, ballpoint pilot 2 dos, ballpoint boxy 2 buah, bantal cap 2 buah, bay fresh refill 20 kaleng, hekter kecil 10 buah, hekter besar 10 buah, isi hekter max no.12/17 12 buah.

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya Kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.12.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.8.784.900, (73,21%) dan fisik 100%. sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.215.100,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Fotocopy, Penggandaan dan penjilidan dokumen 1 paket

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- (100,00%) dan fisik 100%. sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 0,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan berupa : Belanja bola lampu philips 18 watt sebanyak 60 buah, Terminal Fetting sebanyak 25 buah, Terminal Cok sebanyak 25 buah, kabel roll 5 buah, fitting cok 25 buah, Saklar sebanyak 20 buah, Battery 10 lusin.

Hasil (Outcome):

Terlaksananya kegiatan kantor/tugas-tugas kantor

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,- (75.00%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Tersedianya makan untuk 20 kali rapat bagi 20 orang dan snack 20 kali rapat untuk 20 orang.

Hasil (Outcome):

Kalancaran pelaksanaan rapat-rapat kedinasan.

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.177.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp.171.731.000,- (96,70%) dan fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp.5.869.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Transpor PP Ambon-keluar daerah 1 or x 12 keg, Biaya Penginapan Gol. IV 1 org x 12 keg x 3hr, Uang Harian Gol. IV 1 org x 12 keg x 4 hr, Representatif eselon II 1 org x 12 keg x 4 hr.

Hasil (Outcome):

Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana.

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.14.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.5.950.000,- (42.50%) dan fisik 42,50 %. sehingga sisa anggaran sebesar Rp.8.050.000,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Traspor lokal dan uang saku 40 org x 1 hr

Hasil (Outcome):

Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana.

j. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.304.056.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.296.928.478,- (97.66%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 7.127.522,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya Tunjangan BPJS supir dan tenaga administrasi dan Tenaga Teknisi 6 orang 12 bulan

Tersedianya jasa supir dan tenaga administrasi dan Tenaga Teknisi 6 orang 12 bulan

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak untuk mewujudkan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.92.844.000,- dengan realisasi keuangan Rp.92.500.000,- (99,63%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran Rp.344.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

4 unit Air Conditioner (AC) dan 3 unit Leptop, 2 unit komputer All in One, Mikrotik 1 set, Infokus/projector 1 unit, Printer 2 unit.

Hasil (Outcome) :

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.76.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.44.966.693,- (59,17%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran Rp.31.033.307,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Bensin kendaraan dinas roda empat 2 unit x 8 liter x 240hr, solar untuk kendaraan dinas roda empat 3 unit x 8 liter x 240 hr, bensin untuk kendaraan dinas roda dua 4 unit x 4 liter x 240 hr, solar untuk kendaraan dinas roda empat 5 unit x 20 liter x 12 kali, pertamax untuk kendaraan dinas emphibi 1 unit x 40 liter x 1 kali, oli kendaraan dinas roda empat 5 unit x 5 liter x 2 kali, oli kendaraan ops roda empat 7 unit x 5 liter x 2 kali, oli kendaraan amphibi 1 unit x 1 liter x 2 kali, service kendaraan roda 4 dan roda dua 10 unit, belanja suku cabang kend. Dinas roda empat dan roda dua 10 unit, pajak dan STNK kendaraan dinas.

Hasil (Outcome) :

Tersedianya kendaraan dinas/oprasional yang layak/memadai

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.830.000,- (52.20%) dan fisik 100%. sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 7.170.000,-Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Perawatan PC/leptop 15 unit,Printer 14 unit,Ac 10 unit dan mesin fotocopy 1 unit

Hasil (Outcome):

Memperpanjang masa pakai peralatan gedung kantor

2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi pencegahan dini kepada masyarakat serta cara penanganan penanggulangan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.160.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp.105.799.000,- (65,75%) dan fisik 65,75 %, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.55.101.000,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Terlaksananya sosialisasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana

Hasil (Outcome) :

Terciptanya ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana

b. Bulan Pengurangan Resiko Bencana

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.58.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan fisik 0 %, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.58.600.000,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah : tidak tercapai, karna terjadinya rasionalisasi anggaran

Keluaran (Output) :

Terlaksananya bulan pengurangan resiko bencana

Hasil (Outcome) :

Terciptanya pengetahuan dan wawasan kebencanaan

c. Fasilitas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.124.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp.90.415.000,- (72,62%) dan fisik 72,62 %, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.34.085.000,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya Fasilitas dan kesiapsiagaan Bencana

Hasil (Outcome) :

Terciptanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana

d. Workshop Pengelolaan Resiko Banjir

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.126.430.000,- (63,22%) dan fisik 63,22 %, sehingga sisa anggaran Rp.73.570.000,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya laporan pelaksanaan workshop/seminar/lokakarya pengelolaan resiko banjir.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya Kemampuan Instansi Kelembagaan daerah dalam pengelolaan resiko banjir.

e. Kegiatan Penyebaran Informasi Banjir Melalui Informasi Berbasis Media Publik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.118.036.500,- (39,35%) dan fisik 39,35%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.181.963.500,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Terlaksananya penyebaran informasi banjir melalui sistem informasi berbasis media publik

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya wawasan masyarakat terkait ancaman banjir

f. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis Pengelolaan Resiko Banjir

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.279.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.102.839.300,- (36,86%) dan fisik 36,86%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.176.160.700,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Terlaksana Fasilitas dan kesiapsiagaan Bencana

Hasil (Outcome) :

Terciptanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana

g. Pelatihan Kapasitas Tentang Hazard/Risk Map Use

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.279.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.0,- (0%) dan fisik 0%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.279.000.000,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Terlaksana Fasilitas dan kesiapsiagaan Bencana

Hasil (Outcome) :

Terciptanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan

3) Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan

Program ini bertujuan untuk memberikan Informasi kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam maupun non alam baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

a. Rapat Koordinasi Unit Penanggulangan Bencana se-Maluku

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.170.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp.159.922.220,- (94,02%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.10.177.780,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Terlaksananya koordinasi antar unit penanggulangan bencana

Hasil (Outcome) :

Terciptanya sinergitas antara unit penanggulangan bencana provinsi/kab/kota

b. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Bencana Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebencanaan, Pembuatan Buku Statistik Bencana (Buku Data Bencana)

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.166.774.800,- (83,39%) dan fisik 83,39%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.33.225.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Tersedianya buku Data Bencana Tahun 2019

Hasil (Outcome):

Terlaksananya pengumpulan data dan informasi bencana.

4) Program Kedaruratan dan Logistik :

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Aparatur dalam pelaksanaan program/kegiatan melalui pemberian bantuan kedaruratan dan logistik dan memberikan informasi bagi masyarakat serta instansi terkait yang diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penguatan Pusat Pengendalian Operasional Bencana (PUSDALOPS)

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.85.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.80.187.800,- (94,34%) dan fisik 94,34%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.812.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Ketersediaan data dan pengelolaan informasi bencana untuk pengambilan kebijakan penanggulangan bencana.

Hasil (Outcome) :

Tersedianya data dan pengelolaan informasi bencana untuk pengambilan kebijakan penanggulangan bencana.

b. Penyediaan dan Penyiapan Logistik Penanggulangan Bencana

Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.150.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp.117.920.200,- (78,51%) dan fisik 78,51%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.32.279.800,-. Capaian kinerja ini adalah :

Keluaran (Output):

Tersedianya barang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Hasil (Outcome):

Tersedianya kesiapsiagaan terhadap operasional gudang logistik dan peralatan penanggulangan.

5) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

Program ini bertujuan untuk upaya penanganan penanggulangan pasca bencana yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.120.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp.119.580.000,- (99,15%) dan fisik 99,15%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.020.000,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Usaha mikro dalam peningkatan ekonomi masyarakat pasca bencana

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya kemampuan Masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca bencana.

b. Kegiatan Fasilitasi penanggulangan Pasca Bencana

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.105.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.750.000 (98.34%) dan fisik 100%. sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 1.250.000,-Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output):

Tersedianya dokumen penanganan pasca bencana.

Hasil (Outcome):

Terlaksananya kegiatan fasilitas penanggulangan pasca bencana.

6). Permasalahan dan Pemecahan Masalah

a. Permasalahan

Peruntukkan anggaran untuk menunjang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku selama Tahun Anggaran 2019 dilihat dari pencapaian program dan kegiatan masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan baik di Sekertariat maupun bidang teknis. Antara lain permintaan dana yang mendukung setiap kegiatan di bidang seringkali tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan, bahkan sering ditemukan juga bukti pertanggungjawaban disampaikan tidak tepat waktu, dan hal ini mempengaruhi secara keseluruhan permintaan lanjutan di BUD BPPKAD. Juga terjadinya gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 september 2019 yang menyebabkan semua ASN yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku difokuskan pada penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi tersebut mengakibatkan program /kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan dari sisi aparatur penunjang kegiatan, terdapat kekurangan tenaga, pada BPBD Provinsi Maluku terdiri dari 34 Serta 15 tenaga tidak tetap yang belum memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Pemecahan Masalah

Perlu adanya penataan administrasi keuangan dengan mengikuti alur proses penerimaan dan pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu serta permintaan dana sesuai dengan anggaran kas yang sudah ditetapkan.

Perlu adanya penambahan tenaga/staf penunjang dalam mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

2.2 Perkiraan Pencapaian Renja Tahun 2021.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.752.655.000,-, (Tujuh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk membiayai 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Indikator Keluaran	Lokasi
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.670.000.000,-		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000,-	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Kota Ambon
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	35.000.000,-	Peningkatan sumber daya aparatur	Kota Ambon, Kab. SBT, Luar Daerah
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.200.000,-	Terlaksananya acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana	Provinsi Maluku
4	Satuan Pendidikan Aman Bencana	200000000,-	Terbentuknya satuan pendidikan aman bencana	Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah
5	Penyebaran Informasi Banjir melalui informasi berbasis media publik	150.000.000,-	Terlaksananya Pengenalan Bencana Banjir kepada Mahasiswa di Perguruan Tinggi serta OPD terkait	Kota Ambon
6	Peningkatan kapasitas pengelolaan resiko banjir	110.000.000,-	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas teknis pengelolaan resiko banjir	Kota Ambon, Luar Daerah
7	Peningkatan kapasitas Hazard/Risk Map Use	110.000.000,-	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas tentang Hazard/Risk Map use	Kota Ambon, Luar Daerah
8	Simulasi Penanganan Bencana	500.000.000,-	Terlaksananya simulasi penanganan bencana	Kota Ambon, Luar Daerah

9	Desa tangguh bencana	500.000.000,-	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Kab.Maluku Tengah,SBB dan Luar Daerah
II	Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan	1.450.000.000,-		
1	Rapat Koordinasi Unit Penanggulangan Bencana se-Maluku	400.000.000,-	Terlaksananya koordinasi bidang penanggulangan bencana	Kota Ambon
2	Pengumpulan Data dan Informasi Bencana dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebencanaan, dan Pembuatan Buku Statistik Bencana (Buku Data Bencana)	200.000.000,-	Tersedianya Data dan Informasi Bencana dalam Rangka Penyusunan Buku Data Bencana	11 Kab,Kota, Provinsi
3	Bimbingan teknis penguatan kapasitas PUSDALOPS-PB	250.000.000,-	Terlaksananya bimbingan teknis penguatan kapasitas PUSDALOPS -PB	Provinsi Maluku
4	Penguatan pusat pengendalian dan operasi penanggulangan bencana (PUSDALOPS-PB)	250.000.000,-	Terlaksananya proses pengendalian operasi penanggulangan bencana	Provinsi Maluku
5	Reviu dokumen rencana penanggulangan bencana (PRB) Provinsi Maluku	200.000.000,-	Terlaksananya reviuw dokumen rencana penanggulangan bencana	Kota Ambon,Luar Daerah
6	Fasilitasi penyusunan dokumen rencana kontigensi	150.000.000,-	Terlaksananya reviuw dokumen rencana kontingensi	Kota Ambon,Luar Daerah
III	Program Kedaruratan dan Logistik	1.100.000.000,-		
1	Penyediaan dan Penyiapan Logistik Penanggulangan Bencana	400.000.000,-	Terlaksananya penyediaan dan penyiapan logistik penanggulangan bencana	Provinsi Maluku
2	Pelatihan Kaji Cepat untuk Analisa Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana	250.000.000,-	Terlaksananya pelatihan kedaruratan PB	Provinsi Maluku
3	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan serta Kebutuhan Logistic dan Peralatan PB	200.000.000,-	Terlaksananya penyediaan dan penyiapan logistic PB	11 Kab/Kota
9	Pendampingan Pengelolaan Bantuan Darurat	250.000.000,-	Terlaksananya Pendampingan penanganan darurat bencana	Provinsi Maluku
IV	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2.000.000.000,-		
1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	1.000.000.000,-	Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha mikro dan peningkatan ekonomi masyarakat pasca bencana	Kota Ambon, Kab.Maluku Tengah dan Kab. SBB
2	Monitoring dan Evaluasi	500.000.000,-	Terlaksananya	4 Kab/Kota

	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Monitoring, identifikasi, Evaluasi pasca bencana	
3	Pelatihan JITU/PASNA	250.000.000,-	Terlaksananya pelatihan Jitupasna	Provinsi Maluku
4	Inventarisasi, Identifikasi, Verifikasi dan Evaluasi Pasca Bencana	250.000.000,-	Terlaksananya Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi Pasca Bencana	7 Kab/Kota
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,-		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pormal	150.000.000,-	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pormal	Luar Daerah
VI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37.500.000,-		Ambon
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	37.500.000,-	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Ambon
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.924.060.000,-		Ambon
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	500.000.000,-	Tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Ambon
2	Pengadaan Meubeler	300.000.000,-	Tersedianya meubeler	Ambon
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Ambon
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	400.000.000,-	Terawatnya gedung/ bangunan kantor	Ambon
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	474.060.000	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Ambon
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	50.000.000,-	Terlaksananya jasa perbaikan/pemeliharaan perlengkapan kantor	Ambon
VIII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.145.440.000,-		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.500.000,-	Terlaksananya proses surat menyurat antar Instansi Pemerintah	Ambon
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	155.400.000,-	Tersedianya sarana komunikasi, penerangan dan air bersih kantor	Ambon
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70.000.000,-	Tersedianya jasa kebersihan serta bahan dan peralatan kebersihan kantor	Ambon
4	Penyediaan alat tulis kantor	80.000.000,-	Tersedianya alat tulis kantor	Ambon
5	Penyediaan barang cetakan	15.700.000,-	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor	Ambon
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	20.000.000,-	Tersedianya komponen instalasi	Ambon

	kantor		listrik/penerangan kantor	
7	Penyediaan makanan dan minuman	25.200.000,-	Tersedianya kebutuhan makan minum kantor	Ambon
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15.000.000,-	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ambon
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	275.600.000,-	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Ambon
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	482.040.000,-	Tersedianya jasa supir,tenaga administrasi dan tenaga teknis	Ambon

Diperkirakan capaian realisasi pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan dapat mencapai 98 % (Sembilan puluh delapan persen).

3 Pencapaian dan Target Renstra

Dari 8 Program dan 41 kegiatan yang direncanakan dalam Renstra 2019-2024, dan telah direalisasi sebanyak 41 kegiatan, pelaksanaan sampai dengan tahun ketujuh berdirinya BPBD Provinsi Maluku.

2.1. Analisis Pelayanan Kinerja

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, sebagai unsur pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana, maka tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku adalah ***"Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi Daerah di bidang Penanggulangan Bencana"***.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku mempunyai fungsi :

- Melaksanakan Koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah lainnya di daerah, instansi vertical yang ada didaerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan
- Pengkomandoan, melalui perangkat SDM, Peralatan dan logistik instansi terkait, instansi vertical yang didaerah dalam rangka penanggulangan darurat bencana
- Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD Lainnya di daerah, instansi vertical yang ada didaerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perumusan program dibidang penanggulangan bencana sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah
- Penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata

- Perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana
- Penyiapan Penyusunan Prosedur tetap penanggulangan bencana
- Penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi darurat bencana
- Penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Terhadap tugas dan fungsi diatas maka BPBD Provinsi Maluku telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan pelayanan publik dengan capaian kinerja rata-rata diatas 90 Persen.

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis bidang penanggulangan bencana yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan bencana daerah Provinsi Maluku adalah:

1) Kendala

Permasalahan semua umum yang dihadapi dibidang penanggulangan bencana antara lain :

- a) Belum semua regulasi penjabaran dari Undang undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah ditetapkan ;
- b) Belum adanya standart operational procedure (SOP) dalam penanggulangan bencana;
- c) Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana ;
- d) Belum terpenuhinya peralatan dan sarana penanggulangan bencana yang ideal ;
- e) Rencana Operasi tidak selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan bencana ;
- f) Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2) Peluang

- a) Adanya Undang undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21, 22, dan 23 tahun 2008,
- b) Adanya kebijakan tentang penanggulangan bencana,
- c) Harapan masyarakat tentang penanggulangan bencana semakin meningkat,

- d) Adanya dukungan dana APBD dan APBN,
- e) Kerjasama dengan Organisasi-organisasi penanggulangan bencana, perguruan tinggi, departemen, LSM, Dinas/Instansi lain dan swasta.

3) Program Prioritas

- a. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan;
- b. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana;
- c. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
- d. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

2.2. Review terhadap Rancangan Awal OPD

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku ditinjau dari jumlah program dan kegiatan serta anggaran pada umumnya sama sesuai dengan hasil analisis dan kebutuhan yang terdapat pada Renstra BPBD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terutama yang terkait dengan anggaran, antara lain sebagai berikut :

- Terdapat selisih lebih pada anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, meliputi kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran;
- Terdapat selisih kurang pada anggaran program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. dikarenakan beberapa kegiatan di Renstra yang tidak diakomidir di Renja. Hal ini karena anggaran kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari dana hibah pusat.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tugas dan fungsi BPBD adalah, koordinasi, komando dan pelaksana, dikaitkan dengan penanganan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana, ketiga tahapan ini BPBD Provinsi Maluku melakukan kegiatan seperti (*pra bencana*) adalah sosialisasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, serta pengadaan peralatan dini tsunami. **Saat bencana/tanggap darurat** yang dilaksanakan selama tahun 2021 untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat seperti penyediaan dan penyiapan logistik darurat penanggulangan bencana, pelatihan/bimtek manajemen tempat pengungsi dan peralatan SAR pemukiman, pendampingan penanganan kejadian bencana, Sedangkan **tahapan pasca bencana**, lebih difokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui

kegiatan pemulihan sosial ekonomi, kegiatan identifikasi, verifikasi, inventarisasi dan evaluasi pelaporan pasca bencana dengan obyek kegiatan adalah melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut BNPB melaksanakan salah satu dari 7 Agenda Pembangunan Nasional sesuai RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan dan Perubahan Iklim, dengan arah kebijakan meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- 3) Pembangunan Rendah Karbon;

Arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan target yang ingin dicapai adalah berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta indikator kinerja sasaran adalah pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya iklim sebesar 0,3% terhadap PDB di tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Sedangkan indikator kinerja, meliputi :

- 1) Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah;
- 2) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim;
- 3) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca;
- 4) Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca.

Untuk pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin pada kelembagaan penanggulangan bencana yang telah terbentuk di daerah semakin meningkat. Selain itu pada beberapa

lokasi juga telah dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana meliputi penyusunan kajian dan peta risiko bencana, penguatan analisis mitigasi bencana dalam penyusunan rencana tata ruang, penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi, pembentukan desa tangguh bencana, penguatan sumber daya penanggulangan bencana, pembentukan dan pemberian bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi, serta instalasi sistem peringatan dini multiancamn bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

- J Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai dokumen dasar perencanaan dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dibidang penanggulangan Bencana kepada masyarakat di daerah Maluku yang siap dan tanggap dalam menghadapi bencana, Serta Didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di Provinsi Maluku untuk kurun waktu 1 tahun.
- J Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 ini, Agar terwujudnya kesadaran masyarakat untuk hidup harmonis didaerah rawan bencana dan tanggap terhadap kemungkinan terjadinya bencana yang didukung oleh kesiapan sumber daya dan peralatan yang mendukung dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Maluku untuk kurun waktu 1 tahun.

3.3. Program dan Kegiatan

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD 2019-2024 dan Restra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku 2019-2024, dalam tahun anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku merencanakan 7 Program dan 48 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program, Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :

- Rehabilitasi gedung kantor
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan dan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terdiri dari :

- Pendidikan Dan Pelatihan Formal

4. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
- Pengembangan System Peringatan Dini (Early Warning System)
- Penyebaran Informasi Banjir melalui Sistem Informasi Berbasis Media Publik
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Pengelolaan Risiko Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
- Pemberdayaan dan Pemulihan sosial ekonomi pascabencana
- Inventarisasi, Verifikasi, dan validasi kerusakan dan kerugian pascabencana
- Workshop kajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Risiko Banjir

- Peningkatan Kapasitas Hazard/Risk Map Use
- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penguatan Kelembagaan Daerah
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

B. Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Rencana Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 tersebar pada Kab / Kota.

C. Jumlah Pagu Indikatif

Rencana Kebutuhan Anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 10.362.000.000 (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah)**, sebagaimana matriks rumusan program dan kegiatan serta pendanaan terlampir.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 ini berangkat dari pelaksanaan proses koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi pada rapat/forum koordinasi perencanaan pembangunan penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun tingkat pusat tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai acuan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, untuk itu keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Renja ini pada akhirnya akan sangat tergantung kepada alokasi anggaran dan etos kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggara pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Maluku, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Demikian pokok-pokok Dokumen Renja Tahun 2021 kami buat, dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kinerja BPBD Provinsi Maluku dan juga untuk mengetahui permasalahan pada program kerja Tahun 2020 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja tahun 2021, disamping itu dokumen ini merupakan bahan masukan untuk pihak pengambil kebijakan dalam meningkatkan ketangguhan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2020

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Maluku**

HENRI M. FAR FAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620707 199211 1 001